



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOCHAMAD BASUKI HADIMULJONO**
2. Jabatan : **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
3. NHK : **8920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **16.325.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/45 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 541 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m²/125 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
5. Tanah Seluas 393 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m²/490 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000
7. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 541 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **90.000.000**

1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CROWN ROYAL SALOON 3.0 G A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **547.350.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.703.958.557
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	33.666.308.557
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	33.166.308.557

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.